

## ANALISIS KEBIJAKAN DIGITALISASI PENDIDIKAN DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR

Khairatunnisa<sup>1</sup>, Ahmad Suriansyah<sup>2</sup>, Ratna Purwanti<sup>3</sup>

Email: [khairatunnisaaa25@gmail.com](mailto:khairatunnisaaa25@gmail.com)<sup>1</sup>, [ahmad.suriansyah@ulm.ac.id](mailto:ahmad.suriansyah@ulm.ac.id)<sup>2</sup>, [ratna.purwanti@ulm.ac.id](mailto:ratna.purwanti@ulm.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Lambung Mangkurat

### ABSTRAK

Transformasi digital di sektor pendidikan Indonesia telah mendorong pemerintah untuk mengadopsi berbagai kebijakan digitalisasi sebagai respons terhadap tantangan geografis, kesenjangan akses, dan rendahnya literasi digital. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis arah, capaian, hambatan, serta rekomendasi kebijakan digitalisasi pendidikan melalui pendekatan kajian literatur. Metode yang digunakan adalah literature review dengan sumber dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, dokumen kebijakan, dan laporan lembaga internasional. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan seperti Merdeka Belajar, Rapor Pendidikan, Digital Learning Management System, dan Dapodik telah membawa kemajuan signifikan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan infrastruktur, rendahnya kompetensi digital guru, dan kurangnya koordinasi lintas lembaga. Dibandingkan dengan negara-negara seperti Korea Selatan dan Finlandia, Indonesia masih perlu memperkuat kebijakan berbasis ekosistem pembelajaran yang inklusif dan berkelanjutan. Kajian ini merekomendasikan peningkatan investasi di daerah 3T, pelatihan berkelanjutan bagi guru, kolaborasi lintas sektor, serta riset evaluatif jangka panjang untuk mengukur efektivitas kebijakan digitalisasi pendidikan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Digitalisasi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, Literasi Digital, Transformasi Digital.

### ABSTRACT

*The digital transformation of Indonesia's education sector has prompted the government to adopt various digitalization policies in response to geographical challenges, access disparities, and low digital literacy. This study aims to analyze the direction, achievements, challenges, and policy recommendations for education digitalization through a literature review approach. The method involves reviewing national and international academic journals, policy documents, and reports from international organizations. Findings reveal that policies such as Merdeka Belajar, Rapor Pendidikan, the Digital Learning Management System, and Dapodik have contributed significantly to digital progress, although challenges persist especially in infrastructure gaps, limited digital competence among teachers, and weak interagency coordination. Compared to countries like South Korea and Finland, Indonesia still needs to strengthen policies that support an inclusive and sustainable learning ecosystem. The study recommends increasing investments in remote areas, providing ongoing digital competency training for teachers, promoting cross-sector collaboration, and conducting long-term evaluative research to assess the effectiveness of educational digitalization policies in Indonesia.*

**Keywords:** Education Digitalization, Education Policy, Digital Literacy, Digital Transformation.

## **PENDAHULUAN**

Transformasi digital telah menjadi arus global yang mengubah berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali dunia pendidikan. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), digitalisasi pendidikan muncul sebagai kebutuhan strategis dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan. Menurut laporan UNESCO (2023), lebih dari 60% negara sedang mempercepat kebijakan transformasi digital pendidikan pasca-COVID-19. Di Indonesia, tantangan geografis, ketimpangan akses, serta rendahnya literasi digital menjadi faktor yang mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan digitalisasi sebagai solusi inovatif.

Digitalisasi pendidikan di Indonesia telah digerakkan melalui berbagai kebijakan, seperti program Merdeka Belajar, Platform Rapor Pendidikan, Digital Learning Management System, dan pemanfaatan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara masif. Namun, keberhasilan kebijakan ini belum merata di seluruh wilayah. Masih ditemukan kesenjangan antara sekolah di daerah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), baik dari sisi infrastruktur maupun kompetensi sumber daya manusia.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan digitalisasi pendidikan di Indonesia melalui pendekatan kajian literatur. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah kebijakan, capaian, hambatan, serta rekomendasi penguatan implementasi kebijakan digitalisasi pendidikan menuju sistem pendidikan yang inklusif dan adaptif di era digital.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur (*literature review*) sebagai metode utama. Kajian ini dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, menyeleksi, dan menganalisis referensi akademik dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik digitalisasi pendidikan di Indonesia.

1. Sumber data utama penelitian ini berasal dari:
  - Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional.
  - Dokumen kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
  - Laporan lembaga internasional seperti UNESCO, OECD, dan ADB.
  - Buku akademik dan hasil penelitian terdahulu.
2. Kriteria Inklusi
  - Jurnal terbit antara tahun 2015–2025.
  - Fokus pada kebijakan pendidikan, dan transformasi pendidikan.
  - Menganalisis implementasi digitalisasi pendidikan

### 3. Analisis Data

Data dianalisis menggunakan pendekatan sintesis tematik, yaitu mengelompokkan temuan-temuan utama ke dalam tema-tema yang relevan, seperti bentuk kebijakan, dampak, tantangan, dan peluang digitalisasi pendidikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### 1. Kebijakan Utama Digitalisasi Pendidikan di Indonesia

Sejak tahun 2019, Kemendikbudristek telah merancang berbagai kebijakan untuk mendukung digitalisasi, antara lain:

- Program Merdeka Belajar: Memberi otonomi lebih kepada satuan pendidikan dalam menentukan kurikulum, termasuk pengembangan pembelajaran berbasis digital.
- Platform Rapor Pendidikan: Instrumen berbasis data untuk mendukung evaluasi mutu satuan pendidikan.

- Digitalisasi Sekolah: Pengadaan Chromebook, pelatihan TIK bagi guru, dan penguatan jaringan internet sekolah.
- Dapodik dan ARKAS: Basis data pendidikan dan aplikasi perencanaan anggaran yang terintegrasi dan digital.

Dokumen-dokumen kebijakan seperti Permendikbud No. 137/2014, Renstra Kemendikbud 2020–2024, serta Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang SPBE memperlihatkan keseriusan negara dalam mendorong transformasi digital sektor pendidikan.

## 2. Capaian Implementasi Digitalisasi Pendidikan

Beberapa capaian penting kebijakan digitalisasi meliputi:

- Lebih dari 100.000 sekolah sudah memiliki akun dan akses ke Platform Merdeka Mengajar
- Peningkatan kemampuan literasi digital guru berdasarkan hasil pelatihan Digital Learning
- Penurunan kesenjangan data melalui pemutakhiran Dapodik secara berkala

Namun, capaian ini belum menyentuh secara merata sekolah di wilayah 3T, serta belum semua guru memiliki kompetensi teknologi yang memadai.

## 3. Tantangan dalam Implementasi

Berdasarkan laporan dari Kemendikbudristek tahun 2022, hanya 38% sekolah wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang memiliki koneksi internet stabil. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan digital yang signifikan antara daerah 3T dengan daerah lain, terutama perkotaan dimana akses internet stabil mencapai 90%. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam pemerataan pendidikan.

- Kesenjangan Infrastruktur: Tidak meratanya akses internet dan listrik di daerah terpencil dan keterbatasan perangkat keras (laptop, tablet) di sekolah pinggiran
- Kompetensi Digital SDM: Banyak guru belum siap mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dan pelatihan belum masif dan bersifat jangka pendek
- Kebijakan yang Belum Terintegrasi: Koordinasi antara Kemendikbudristek, Diskominfo, dan pemerintah daerah belum optimal dan kurangnya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan digital

## 4. Perbandingan dengan Negara Lain

Beberapa negara seperti Estonia, Korea Selatan, dan Finlandia telah sukses menerapkan kebijakan digitalisasi pendidikan dengan strategi:

- Digitalisasi sejak pendidikan dasar
- Investasi besar dalam pelatihan guru
- Kurikulum berbasis digital literacy dan problem solving
- Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta

Pembelajaran dari negara-negara tersebut menekankan bahwa digitalisasi tidak hanya tentang penyediaan perangkat, tetapi juga membangun ekosistem pembelajaran yang adaptif dan berkelanjutan.

## 5. Peluang dan Rekomendasi Kebijakan

Digitalisasi dapat menjadi sarana untuk mengatasi ketimpangan pendidikan dan memperluas akses belajar jika didukung oleh kebijakan yang inklusif. Beberapa peluang:

- Pemanfaatan platform open-source
- Pelibatan komunitas lokal dan sektor swasta
- Desentralisasi kebijakan dan otonomi sekolah berbasis data

## KESIMPULAN

Digitalisasi pendidikan di Indonesia telah menjadi kebijakan strategis yang berkembang melalui berbagai program dan regulasi. Kajian literatur ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah menghasilkan capaian penting dalam sistem informasi pendidikan, pelatihan guru, dan ketersediaan platform digital. Namun, tantangan besar seperti kesenjangan infrastruktur, literasi digital rendah, dan koordinasi antarlembaga masih menjadi penghambat

utama dalam implementasinya.

Agar digitalisasi pendidikan berjalan efektif, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas SDM, kolaborasi antarinstansi, serta sistem evaluasi kebijakan yang kuat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anderson, J. E. (1975). *Public policymaking*. Holt, Rinehart and Winston.
- Basri, H., & Sari, N. (2021). Analisis kebijakan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(1), 88–103.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE.
- Firmansyah, R., & Sari, D. (2020). Exploring the impact of digital learning policy. *International Journal of Educational Development*, 72, 102128. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2019.102128>
- Harjanto, T., & Nomura, M. (2020). Digital transformation and the Indonesian education system. *Journal of Educational Research and Practice*, 10(1), 45–59.
- Kim, Y. J., & Lee, S. H. (2021). Building digital learning ecosystems: Lessons from Korea. *Asia-Pacific Education Review*, 22(2), 235–248. <https://doi.org/10.1007/s12564-021-09692-1>
- OECD/ADB. (2023). *Transforming Education in Indonesia*. <https://www.oecd.org/education>
- Selwyn, N. (2016). *Education and technology: Key issues and debates* (2nd ed.). Bloomsbury.
- Setiawan, A., & Lestari, R. (2022). Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran di sekolah dasar. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 24(2), 103–112.
- Trucano, M. (2016). *Knowledge maps: ICTs in education*. infoDev/World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0995-7>
- UNESCO. (2022). *Digital Learning and Education in the Post-COVID Era*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381161>
- Walt, G., & Gilson, L. (1994). Reforming the health sector in developing countries: The central role of policy analysis. *Health Policy and Planning*, 9(4), 353–370. <https://doi.org/10.1093/heapol/9.4.353>
- Wijaya, M., & Darmawan, D. (2021). E-learning policy in Indonesian schools: A SWOT analysis. *Education Policy Analysis Archives*, 29(57). <https://doi.org/10.14507/epaa.29.5845>
- World Bank. (2021). *Realizing the promise of education in Indonesia*. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35299>
- Zhao, Y., & Frank, K. A. (2003). Factors affecting technology uses in schools. *American Educational Research Journal*, 40(1), 81–210. <https://doi.org/10.3102/00028312040001081>